

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT terdiri dari dua jenis kelamin, baik berupa laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan untuk saling berpasang-pasangan, yang dimana dalam konteks ini berpasang-pasangan merupakan salah satu Sunnatullah atas perintah Allah SWT kepada seluruh makhlukNya, termasuk manusia. Namun dalam faktanya ada fenomena mengenai jenis kelamin ketiga yang menjadi objek sorotan oleh khalayak luas yaitu kelainan dan ketidakjelasan jenis kelamin (*intersex*).¹ Dalam bentuk kelainan dan ketidakjelasan jenis kelamin tersebut merupakan adanya individu-individu yang secara fisik jelas menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tetapi memiliki kecenderungan tetap dan berkeinginan berperilaku yang berlawanan dengan jenis kelamin fisiknya. Fenomena ini dikenal dengan istilah transeksual atau transgender. Adanya transeksual ini berakibat terhadap mereka yang mengalami hal ini yaitu bahwa mereka tidak bisa dikatakan laki-laki ataupun perempuan, untuk itulah kemudian ada kebutuhan mereka untuk menentukan identitas dirinya, apakah lebih condong ke laki-laki atau lebih condong kepada perempuan.²

Di negara lain seperti Thailand, Malta, Nepal, India, Pakistan, Bangladesh, New Zealand, Denmark, dimana negara-negara tersebut telah memberikan ruang terhadap orang-orang yang melakukan transeksual. Alasan utama yang dijadikan dasar dalam melegalkan

¹ Asep Dadang Abdullah. *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*. Istinbath. Vol. 12. No. 1, Desember 2013. hlm. 221.

² Ibid. hlm. 222

fenomena transeksual ini adalah adanya perlindungan dari diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Sehingga negara-negara tersebut banyak usulan untuk membuat rancangan undang-undang (RUU) yang nantinya untuk mengatur adanya hal ini. Salah satu negara yang telah membuat RUU dan telah disetujui oleh pemerintah di negaranya adalah negara Melita, dimana dalam aturannya negara Melita bukan hanya mengizinkan orang-orang melakukan transeksual tetapi juga mengizinkan pernikahan sesama jenis. Hal ini juga telah kesepakati oleh para anggota parlemen dalam bentuk voting.³ *Mengingat terkait transeksual yang ada di Indonesia merupakan hal yang sangat tabu dan susah untuk dipahami oleh sebagian orang.*

Di Indonesia secara norma masih belum ada aturan perundang-undangan yang spesifik terkait dengan adanya transeksual, dan bagaimana legalitas warga yang telah melakukan transeksual. Pada tahun 2019 sudah banyak warga negara Indonesia sendiri telah melakukan transeksual baik dari kalangan bawah sampai keatas. Peran pemerintah pun tak kunjung ada untuk menangani terkait adanya transeksual.

Walaupun dalam dunia medis ada beberapa aturan yang dapat dikaitkan dengan transeksual seperti halnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 191/MENKES/SK/III/1989⁴, tentang penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini dikatakan bahwa pada dasarnya pula manusia terdiri dari jenis laki-laki dan wanita, tetapi pada kenyataannya terdapat orang-orang yang berjenis kelamin berlawanan

³ Neneng Pratiwi. *9 Negara Yang Telah Akui Gender Ketiga Selain Pria Dan Wanita*. diakses pada tanggal 20 januari 2020.

⁴ Lihat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin.

dengan keadaan jiwanya, sehingga menimbulkan penderitaan batin atau gangguan jiwa, dan bila perlu dilakukan operasi penyesuaian kelamin sebagai tindakan terakhir. Dalam ilmu kedokteran dikenal (3) tiga macam bentuk operasi kelamin, yaitu:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal;
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna;
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (penis dan vagina).

Tetapi hal ini masih belum mengatur secara rinci terkait bagaimana cara penyesuaian jenis kelamin, termasuk hukum apa saja yang harus dilakukan ketika seorang pelaku transeksual disetujui dalam operasi ganti kelaminnya.⁵

Istilah transeksual juga tidak asing dalam Agama Islam, dimana orang pada zaman dahulu memandang ketika ada seseorang wanita atau laki-laki namun dalam kondisi fisiknya tersebut bertentangan dengan kondisi alat kelamin pada dirinya disebut dengan *Khuntsa*, maksud *Khuntsa* disini adalah bentuk fisik bagian luar tidak sama dengan bagian dalam atau yang bisa disebut dengan *kelamin ganda*, contohnya; jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan memiliki rahim, sementara bagian luar memiliki penis, atau memiliki keduanya (*penis dan vagina*). Ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam laki-laki tetapi

⁵ Klarisa & Budi sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin Di Indonesia*, ISBN 978-602-50127-0-9, Pekanbaru, Juli 2017, hlm.166.

bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Seseorang yang mengalami hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam untuk menentukan jenis kelaminnya⁶

Fenomena ini juga diperkuat dengan adanya fakta yang menarik terkait transeksual dari tahun ke tahun, contoh kasus yang paling terkenal sekarang yaitu Ayluna Putri atau yang dikenal dengan nama Lucinta Luna, dimana Lucinta Luna pernah melakukan pergantian kelamin sekaligus melakukan Permohonan ganti kelamin ke Pengadilan Jakarta Barat, hal ini dapat dibuktikan dalam pokok perkaranya yaitu Nomor: 733/Pdt.P/2016/PN Jkt.Brt. Bahwa dalam petitumnya menyatakan telah menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebelumnya bernama Muhammad Fatah berjenis kelamin laki-laki yang selanjutnya diubah menjadi Ayluna Putri berjenis kelamin perempuan. Bukan hanya daerah Jakarta saja yang terlibat dalam pengajuan permohonan ganti kelamin tetapi masih banyak lagi daerah-daerah tertentu yang masyarakatnya pernah melakukan transeksual seperti di daerah Surabaya, Yoyok Prasetyo adalah satu orang yang merubah statusnya menjadi perempuan bernama Denissia Prasetyo dengan perkara Nomor : 1047/Pdt.P/2108/PN.Sby, selanjutnya ada Avika Warisman yang melakukan permohonan ganti kelamin dengan perkara Nomor: 1188/Pdt.P/2018/PN.Sby, dan banyak lagi yang lainnya sehingga dalam kasus ini secara tidak langsung Indonesia telah melegalkan adanya transeksual, dimana dalam ketentuan normatif terkait transeksual sendiri belum diatur secara jelas dan detail oleh pemerintah, sehingga dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini yaitu tidak adanya kepastian hukum di Indonesia mengenai transeksual.

Mengingat terkait kontroversi transeksual yang masih menjadi perdebatan dan pembicaraan masyarakat luas terutama terkait fenomena LBGT di Indonesia, hal ini menarik

⁶ Gibtiah, *Studi Perbandingan tentang Khuntsa dengan Transeksual*, Intizar, Vol. 20, No. 2, 2014, hlm. 352.

minat penulis untuk meneliti lebih mendalam mengenai legalitas transeksual terkait dengan permohonan ganti kelamin berdasarkan alat-alat bukti di pengadilan negeri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan transeksual dalam perpektif hukum positif dan hukum agama ?
2. Alat bukti apa saja yang harus diserahkan oleh pemohon transeksual dalam melengkapi pengajuan permohonan di pengadilan ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan transeksual dalam perpektif hukum positif dan hukum agama.
2. Untuk mengetahui alat bukti apa saja yang harus diserahkan oleh pemohon transeksual dalam melengkapi pengajuan permohonan di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan referensi baru dalam ilmu hukum dan menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait dengan adanya Transeksual di Indonesia.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan ilmu tambahan dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum acara perdata khususnya.
 - c. Diharapkan dari hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi dalam ilmu bidang karya ilmiah dan bahan masukan bagi penelitian bagi yang meneliti terkait adanya transeksual di Indonesia.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan ilmu baru dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai bagaimana legalitas transeksual dalam perspektif hukum positif dan hukum agama untuk mewujudkan kepastian hukum.
- b. Untuk mengembangkan analisa dan pola pikir dalam karya ilmiah, serta pengujian dan ilmu dan pengetahuan yang digunakan oleh penulis selama masa aktif kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

E. Kegunaan penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu ilmu baru dibidang ilmu hukum dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang study kasus terakait Transeksual di Indonesia, dan sekaligus sebagai suatu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 dibidang ilmu hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara nyata atas study kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat di Indonesia mampu memahami tentang bagaimana legalitas dan kepastian hukum dalam transeksual, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek atas kasus yang serupa dikemudian hari berhubungan dengan adanya transeksual yang ada di Indonesia.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru kepada para mahasiswa mengenai penelitian yang dikaji, sehingga mahasiswa jurusan hukum dapat berperan dalam penegakan hukum terkait transeksual di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris artinya adalah suatu metode penelitian yang dimana menggabungkan unsur hukum normatif dan kemudian didukung dengan data atau unsur empiris dan hasil penelitiannya disajikan secara deskriptif analitis dengan mengkaji dan meneliti data-data sekunder berupa sumber-sumber hukum acara perdata dan bahan-bahan kepustakaan terkait untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah legalitas transeksual terkait dengan permohonan ganti kelamin berdasarkan alat-alat bukti di pengadilan negeri.⁷

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer⁸: data primer diperoleh dari beberapa hasil ketetapan pengadilan negeri oleh seorang hakim dalam menangani kasus permohonan ganti kelamin. Berikut beberapa ketetapan terkait permohonan ganti kelamin: Penetapan No: 15/Pdt.P/2015/PN.Smd, Penetapan No. 1188/Pdt.P/2018/PN.Sby, Penetapan No. 57/Pdt.P/2020/PN.Jkt, Penetapan No. 201/Pdt.P/2019/PN.Tng.
- b. Data Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 392

⁸ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 116. Bambang mengemukakan bahwa bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari, 1). Norma atau kaidah dasar pembukaan UUD 1945. 2). Peraturan dasar yaitu UUD 19 Ketetapan-ketetapan MPR. 3). Peraturan perundang-undangan. 4). Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat. 5). Yurisprudensi. 6). Traktat. 7). Bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. Dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat.

literatur yang berkaitan dengan legalitas transeksual terkait dengan permohonan ganti kelamin berdasarkan alat-alat bukti di pengadilan negeri.

- c. Data Tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Indonesia kontemporer yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka yaitu bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

b. Studi Wawancara

Suatu pengumpulan data dengan teknik berkomunikasi langsung dengan narasumber guna mendapatkan informasi dan untuk mendukung objek penelitian dimana penulis melakukan wawancara terhadap salah satu pastur di Gereja Katolik Katedral Malang bersama Bapak Dr. Catur Raharso, Pr. dan Salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang ahli di bidang Hukum Islam yakni Syariful Alam, S.HI., M.HI.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini, penulis perlu menyajikan 4 bab yang terdiri dari beberapa sub-bab, yang nantinya bertujuan untuk memberi kemudahan penulis dalam penelitiannya. Sistematika penulisan ini juga akan menyesuaikan dengan buku pedoman penulisan penelitian hukum yang terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjadi suatu tahapan awal penulisan. Dalam bab pertama ini akan menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjadi suatu kerangka dasar penulisan dalam menganalisa pembahasan pada bab berikutnya. Sistematika dalam bab ini mengacu kepada kerangka pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dalam berbagai sumber yang mendukung berisikan hal-hal yang berhubungan dengan transeksual.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan pokok atas permasalahan yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan dan wawancara mengenai kepastian hukum dalam transeksual, dan legalitas transeksual dalam perfektif hukum positif dan hukum agama.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini menjadi bab terakhir dalam penulisan penelitian hukum oleh peneliti, yang berisikan kesimpulan dan saran dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat penulis yaitu mengenai legalitas transeksual terkait dengan permohonan ganti kelamin berdasarkan alat-alat bukti di pengadilan negeri.